

**MODEL PEMILU LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SECARA
SERENTAK: (Studi Kasus Di Lampung Tahun 2014)**



S K R I P S I

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**SAIFUL ANSORI
NIM: 10370039**

PEMBIMBING :

DR. AHMAD YANI ANSHORI, S.AG., M.AG.

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pemilihan umum tahun 2014 berlangsung lebih demokratis serta mampu menggugah antusias masyarakat untuk aktif berpartisipasi serta menjadi kontrol terhadap pelaksanaan pemilu. Pada pemilihan umum 2014, khususnya di daerah Provinsi Lampung yang dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan pemilihan umum Legislatif. Hal ini menjadi sebuah pengetahuan baru untuk memperbaiki sistem pemilu kedepan. Bagaimana manajemen pemilu KPUD Lampung dalam melaksanakan pemilu Legislatif dan eksekutif secara serentak tahun 2014?.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*fielt receach*) dengan mengumpulkan data dan informasi langsung yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari KPUD Provinsi Lampung. Serta melakukan wawancara dari pihak-pihak yang terkait yakni para anggota Komisioner KPU Lampung beserta Jajarannya, dan buku-buku atau referensi-referensi lain yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.

Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitis* dengan mengoperasikan teori *Good Governance* atau pemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik yakni; Partisipasi (*participation*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*transparency*), Responsif (*Responsive*), Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektivitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Visi Strategis (*Strategic vision*). Dan dengan mempertajam pengoperasian prinsip Efektivitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*) yakni; prinsip keseimbangan, prinsip mencapai kemanfaatan, prinsip tidak boros dan prinsip berlaku adil.

Pemilu serentak secara garis besar dapat dilaksanakan dengan beberapa model. *Pertama*, penyelenggaraan pemilu serentak untuk legislatif (DPRD I/DPRD II) dan eksekutif (Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota). *Kedua*, penyelenggaraan pemilu serentak untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Legislatif (DPR dan DPD).

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Legislative, Eksekutif, Persepektif Siyasah*



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIFUL ANSORI
NIM : 10370039
Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara dan Politik Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2014

Penulis



SAIFUL ANSORI
NIM: 10370039



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara SAIFUL ANSORI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SAIFUL ANSORI
NIM : 10370039
Judul : MODEL PEMILU LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SECARA
SERENTAK: (Studi Kasus Di Lampung Tahun 2014)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Siyasah (Ketanegaraan dan Politik Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

Pembimbing

DR. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197311051996031004



Jl. Masda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 5281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2068/2014


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: MODEL PEMILU LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
SECARA SERENTAK: (Studi Kasus Di Lampung
Tahun 2014)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

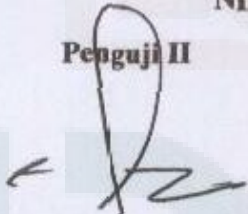
Nama : SAIFUL ANSORI
NIM : 10370039
Telah dimunaqasahkan pada : 16 Oktober 2014
Dengan nilai : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH
Penguji I/Ketua Sidang,**


Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197311051996031004

Penguji II


Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP: 19750517200501 1004


Penguji III


Dr. H. Kamsi, MA.
NIP: 195702071987031003

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

**UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN**




Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

***“Hidup Hanyalah Untuk Berbakti Dan
Mengabdikan Serta Menunggu Mati; Lebih
Baik Menjadi Kepala Semut Dari Pada
Menjadi Ekor Gajah”***

**”Membaca Menjadi Tahu, Menulis Menjadi Mengerti,
Melakukan Menjadi Paham, Dan Mengamalkan Menjadi
Manfaat: Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi
Seluruh Alam Semesta Dan Se-Isinya”**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini

Khusus untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Tarwi Dan Ibunda Parmi Beliaulah Yang Selalu mengajarkan arti keidupan, serta menyayangiku yang tiada batas waktu, bagiku beliau adalah segalanya dalam kehidupan ini. Berkat beliau maka aku terlahir untuk menjalani hidup yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa.

Semoga Allah SWT Selalau Memberikan Kekuatan, Umur Panjang, kesehatan Dan Balasan Yang Tak Terhingga Buat Ayahanda dan Ibunda Yang sangat ku hormati dan ku sayangi

Untuk kelurgaku semua Saudaraku Yang Selalu menyayangiku, Mendukung Dan Memberi Semangat Untuk Menjadi Orang yang Bermanfaat dunia dan akhirat. . .

Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku yang pantas terucap Kecuali Ucapan Terimakasih Yang Tiada Terhingga...

Buat Pembimbingku Bapak DR. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.

Yang Selalu Mengarahkan dan mendidikku serta Memotifasi Dalam Menyelesaikan Skripsi,

Buat Sahabatku Haris Santoso yang selalu membantuku dalam penelitian lapangan,

Buat sahabat-sahabatku dalam komunitas Korp Gempha 2010 yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu,

Buat keluarga besar Rayon Ashram Bangsa PMII Fakultas Syariah dan Hukum,

Buat semua pengurus Badan eksekutif mahasiswa fakultas syariah dan hukum(BEM-FSH) periode 2013-2015.

Buat semua pimpinan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Fakultas Syariah dan Hukum.

Buat teman-teman jurusan Siyasa angkatan 2010 yang baik-baik dan selalu kompak

Semoga Allah SWT Selalau Memberikan Kekuatan, Umur Panjang, kesehatan Dan Balasan Yang Tak Terhingga Buat semua yang turut mebantuku serta memberikan dukungan dan semangat untukku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Ẓukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis Ditulis	Â Tansâ

	تنسي		
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, واسهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له, و اشهد ان محمدا عبده ورسوله, بعثه الله اسوة حسنة وهاديا الى الحق وداعيا اليه ارسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد.

بسم الله الرحمن الرحيم

و يوم نبعت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم صل وجنابك شهيدا على هؤلاء, ونز لنا عليك الكتب تبينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“MODEL PEMILU LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SECARA SERENTAK: (Studi Kasus Di Lampung Tahun 2014).**

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW., manusia sempurna yang telah memberikan petunjuk jalan kehidupan yang

penuh rasa kasih sayang sehingga kita semua merasakan kedamaian dan kesejahteraan hidup, serta semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin....

Penyusunan skripsi ini merupakan bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu dan Ayah tercinta, yang mendidik ku sejak kecil hingga pada detik ini, bahkan tidak terputusnya dan akan terus mengalir deras rasa kasih sayangnya, maka beliaulah Guru Besar sesungguhnya.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua program studi Siyasah.
4. Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi.
5. Para Dosen dan Karyawan Program Studi Siyasah (Ketanegaraan dan Politik Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penyusun belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Kepada saudara-saudaraku, Kakak tercinta Umi, Suprihatin, Janatun Na'im, Trisno Widodo, Atun, Siti Jamil Alfiah, Umi Purwanti, Nurul Hidayah dan adik tersayangku Tri Lestari, bude, pakde, bu lek, pak lek dan keponakan-keponakanku yang ku cintai dan ku sayangi. Karena keberadaan merekalah yang menjadikanku semangat untuk merahi cita-cita, dan atas motivasi dan do'anya serta suportnya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu, bahkan selama-lamanya.
7. Kepada yang memberiku ketentraman jiwa yang terkhusus dan terpatri dalam hati. Penyusun mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya yang setulus hatinya telah memberiku semangat terutama Do'anya yang terus mengalir dengan tenang, dengan tulus hatinya dan dengan kelembutan jiwanya adalah merupakan energi positif yang dapat menjadi fondasi kehidupan dimasa mendatang. Di waktu malam yang sepi dan sunyi tetap setia menemani meskipun di tempat yang berbeda namun merasa ia berada disampingku ketika itu. Mengingatnya adalah indah bagiku, mengingatnya adalah pengobat lelahku, dan mengingatnya adalah semangat hidupku. "2424" (Bross Merah).
8. Kepada sahabat-sahabat keluarga besar Rayon PMII Ashram Bangsa yang telah memberiku ruang untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, untuk berjuang dan mengabdikan, semua itu bagiku adalah pelajaran yang sangat mahal dan bernilai tinggi.
9. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Sahabat Korp Gerakan Mahasiswa Pembaharuan (GEMPHA) 2010 yang selalu kompak dan menyenangkan terutama ketika bersama-sama mengemban amanah

kepengurusan periode 2012-2013 yakni ; Moh. Kholilullah A.R (Ketua Rayon PMII AB), Sofyan Bariqi (Sekjen Umum Rayon PMII AB), Sahrizan Almahzar (Ketua I Rayon PMII AB), Moh. Wahyudi (Ketua II Rayon PMII AB), Lukmanul Hakim (Koordinator Intelektual Rayon PMII AB), M. Sadam Husein (Koordinator Pengkaderan Rayon PMII AB), Hening Tiyas Gahas (Ketua KAPASH Rayon PMII AB), Wildan Habibi (Koordinator ABF Rayon PMII AB), sahabat Bli (Koordinator LitBangder Rayon PMII AB), Fachrudin Alfian Liulinuha (Pimpinan Umum El-PAB), dan seluruh anggota yang tidak kami sebutkan satu-persatu. Hingga sampai hari ini dan selamanya tidak akan kami lupakan di dalam ruang dan duduk bersama waktu itu, yang telah banyak memberiku ilmu, pengetahuan dan pengalaman hidup. Hingga mulai post kepengurusan masih konsisten serta memberikanku dukungan dan semangat dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga sahabat semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi semua mahluk.

10. Menyambung silaturahmi atas konsisten post Rayon telah terbentuknya Forum Group Discussion (FGD) sahabat; kepada sahabat Ida Fitriana, Galuh Tri Pambekti, Riri, Arini, Eni Hartati, Aloonk, Ades, Latif, Dea, Arja Binangun, Agung Jamaludin, Ucup, gunarto, Moh. Sodik dan yang tidak kami sebutkan satu-persatu, yang sudah menuntaskan studinya lebih dulu, namun justru itu yang menjadikan kami semangat untuk menyelesaikan studi, dan pada akhirnya penyusun mampu menyelesaikannya. Terimakasih sahabat-sahabat FGD.

11. Kepada seluruh jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (BEM-FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: H. Ahmad Mun'im Zakaria (wakil Ketua BEM-FSH), Fatah Nashir (Sekjen BEM-FSH), Suraida Salaeh (Bendahara BEM-FSH), Eka Okta Purnama Sari (wakil Sekjen BEM-FSH), Fathul Mubarak (Mendagri BEM-FSH), Dwi Purwaningsih (Kemenkum HAM BEM-FSH), Moh. Hudi (Kemenlu BEM-FSH), Nurul Hidayati (Kemenpora BEM-FSH). Dan juga seluruh anggota yang tidak kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu selama kepengurusan di BEM-FSH periode 2013-2014. Tanpa kami sadari Organisasi Intra ini telah memberiku ruang yang besar dalam mengembangkan diri baik emosional, intelektual, dan spiritual sehingga menyadari bahwa banyak ketidak mampuan dalam diri ini untuk dapat menjadi pemimpin yang baik dan benar, untuk itu mohon maaf kami sampaikan kepada sahabat semua atas ucapan, perbuatan atau tingkahlaku yang kurang menyenangkan hati sahabat semua.
12. Dan tidak lupa juga kami sampaikan kepada semua pimpinan ORMAWA Fakultas Syariah dan Hukum; Imam Mushtofa (ketua SEMA-FSH), A. Miftahul Amin (ketua BEM-J JS), Nurdiansyah (ketua BEM-J AS), Alfian Alfian (ketua BEM-PS IH), Helmi (ketua PSKH 2013), Emil (ketua PSKH 2014) Dina Aulia (ketua BEM-J PMH), Aziz Asy'ari (ketua BEM-J MU) Moh. Aryanto (ketua ADVOKASIA) yang telah bersama-sama berproses dan membangun serta mengabdikan didalam organisasi intra kampus. Bagi kami sahabat-sahabat adalah ruang yang baik yang pernahku singgahi dalam

berdiskusi dan bekerja untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

Penyusun,



SAIFUL ANSORI
NIM: 10370039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GOOD GOVERNANCE DALAM ISLAM	20
A. Pengertian <i>Good Governance</i>	20
B. Prinsip-Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	25
1. Partisipasi (<i>participation</i>)	25
2. Penegakan Hukum (<i>Rule of law</i>)	26
3. Transparansi (<i>Transparency</i>)	27
4. Responsip (<i>Responsive</i>)	27
5. Konsensus (<i>Consensus</i>)	29

6. Kesetaraan (<i>Equity</i>)	30
7. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	31
8. Visi Strategis (<i>Strategic Vision</i>)	33
9. Efektivitas (<i>Effectiveness</i>) dan Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	34
9.1. Pengertian Efektivitas	34
9.2. Pengertian Efisiensi	39
C. Efisiensi Dalam Islam	41
1. Prinsip-Prinsip Efisiensi Dalam Islam	41
1.1. Prinsip Keseimbangan	41
1.2. Prinsip Mencapai Kemanfaatan	42
1.3. Prinsip Tidak Boros	42
1.4. Prinsip Berlaku Adil	43
D. Good Governance Dalam Siyash	44
1. Keadilan (<i>al- 'Adalah, Justice</i>)	45
2. Persamaan (<i>al-Musawah, Egaliterianisme</i>)	46
3. Kemerdekaan (<i>al-Hurriyyah, Freedom</i>)	46
4. Musyawarah (<i>al-Syura, Consultation</i>)	47
5. Pertanggungjawaban (<i>al-Mas 'uliyah, Accountability</i>)	48
BAB III PILGUB DAN PILEG SECARA SERENTAK	
 DI PROVINSI LAMPUNG	54
A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	54
1. Provil Provinsi Lampung	54
1.1. Gubernur Dan Wakil Gubernur	54
1.2. Lambang Dan Arti Logo	55
2. Sejarah Provinsi Lampung	56
3. Letak Geografis	61
4. Demografi	62
5. Politik Dan Pemerintahan	66
B. Pemilu Legeslatif Dan Eksekutif Perwujudan Demokratisasi	
 Di Indonesia	70
1. Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia	70

1.1. Pemilu Sebagai Representatif Demokrasi.....	75
2. Pemerintah Daerah dan Pemilukada	93
2.1. Pemerintah Daerah	93
2.2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Perkembangannya.....	98
2.3. Pemilihan Umum Kepala Daerah	109
2.4. Legislatif Dalam Pemilukada.....	113
2.5. Hubungan Eksekutif Dan Legislatif.....	114
C. Penggabungan Pemilu Gubernur dan Pemilu Legislatif Di Provinsi Lampung	120
1. Dasar Payung Hukum	120
2. Tahap Persiapan Pemilu	125
3. Pelaksanaan Pemilu.....	125
3.1. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap.....	125
3.2. Pencalonan	128
3.3. Pendistribusian Logistik.....	137
3.4. Kampanye Peserta Pemilu	138
3.5. Pelaksanaan Pemungutan Suara.....	142
3.6. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	143
3.7. Penetapan Hasil Pemilu.....	149
BAB IV ANALISIS PILGUB DAN PILEG SECARA SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG 2014	152
A. Pra Pelaksanaan Pemilu Serentak	152
B. Tahap Pelaksanaan Pemilu Serentak	157
1. Kampanye Pemilu 2014 Di Provinsi Lampung.....	158
2. Pemungutan Suara	161
3. Penghitungan Surat Suara.....	164
4. Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara.....	165
C. Pemilu Serentak Lebih Demokratis.....	167
1. Pemilu Serentak Efektif Dan Efisien.....	167
2. Pemilu Serentak Mewujudkan Demokrasi	169

3. Pemilukada Serentak Alternatif Menjunjung Demokrasi....	170
4. Pemilu Efektif dan Efisien Cerminan Demokratis	176
BAB V PENUTUP	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	183
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	i
1. TERJEMAHAN	i
2. DOKUMEN	ii
3. CURICULUM VITAE.....	iii

DAFTAR TABEL

BAB III

Tabel 3.1.	: Luas Wilayah, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung.....	64
Tabel 3.2.	: Kabupaten/Kota Dan Ibu Kota Provinsi Lampung.....	67
Tabel 3.3.	: Daftar Kepala Daerah Provinsi Lampung Dari Tahun 1966-2014.....	68
Tabel 3.4.	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Provinsi Lampung Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota.....	128
Tabel 3.5.	: Rekapitulasi Hasil Ferivikasi Factual Dukungan Calon Perseorangan Balon Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur 2013..	129
Tabel 3.6.	: Nama-Nama Pasangan Calon Partai Pengusung Dan Presentase Suara Sah.....	134
Tabel 3.7.	: Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 20142019.....	136
Tabel 3.8.	: Laporan Harta Kekayaan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Periode 2014-2019.....	137
Tabel 3.9.	: Jadwal Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung....	139
Tabel 3.10.	: Kampanye Dpd Lampug.....	140
Tabel 3.11.	: Jadwal Kampanye Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Periode 2014-2019... ..	142
Tabel 3.12.	: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	144
Tabel 3.13.	: Rekapitulasi Seluruh Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung 2014.....	145
Tabel 3.14.	: Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota Dprd Provinsi Lampung 2014.....	147
Tabel 3.15.	: Rekapitulasi Total Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014.....	148
Tabel 3.16.	: Daftar Calaan Terpilih DPD Provinsi Lampung Pemilihan Tahun 2014.....	151

DAFTAR GAMBAR

BAB II

Gambar 2.1. : Mekanisme Good Governance.....	24
--	----

BAB III

Gambar 3.1. : Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.....	54
Gambar 3.2. : Lambang Provinsi Lampung.....	55
Gambar 3.3. : Peta Provinsi Lampung.....	62
Gambar 3.4. : Pemetaan Atau (Wilayah) Akuntabilitas Publik Tahun 2014.....	117

BAB IV

Gambar 4.1. : Bagan Instruksi Dan Koordinasi KPU Provinsi Lampung Dengan Institusi Terkait.....	157
Gambar 4.2. : Denah TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Dan Gubernur Provinsi Lampung 2014.....	163
Gambar 4.3. : Pelaksanaan Pemilu Legislatif Berbarengan Dengan Pilgub Provinsi Lampung.....	167
Gambar 4.4. : Pemilu Kepala Daerah Dan Legislatif (DPRD I Dan DPRD II) Secara Bersamaan.....	178
Gambar 4.5. : Pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Bersamaan Dengan Pemilu Legislatif (DPR Dan DPD)	179

DAFTAR SINGKATAN KATA

KPU: Komisi Pemilihan Umum
KPU: Komisi Pemilihan Umum Daerah
DPR: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GG: *Good Governance*
GCG: *Good Corporate Governance*
DP4: Daftar Penduduk Potensi Pemilihan Pemilu
MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NRI: Negara Republik Indonesia
UUD: Undang-Undang Dasar
UU: Undang-Undang
UUDS: Undang-Undang Dasar Sementara
RIS: Republik Indonesia Serikat
RUU: Rancangan Undang-Undang
PNI: Partai Nasionalis Indonesia
MPP: *Mixed Member Proportional*
GBHN: Garis-garis Besar Haluan Negara
KKN: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
ABRI: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI: Tentara Nasional Indonesia
LPJ: Laporan Pertanggung Jawaban
PNS: Pegawai Negeri Sipil
MK: Mahkamah Konstitusi
LPPD: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BUMD: Badan Usaha Milik Daerah
APBD: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampain pesan mengenai program, platform, asas, idiologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam lembaga Legeslatif maupun lembaga Eksekutif.¹

Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang disebut juga sebagai *Ulil Amri* atau *Khalifah* atau imam atau *Amirul* atau pemerintah, yang dikepalai oleh seorang perdana menteri bagi kabinet parlementer merangkap kepala negara dalam kabinet presidensil.

Lembaga Legislatif yaitu lembaga yang membuat undang-undang disebut juga sebagai parlemen karena *parle* berarti bicara. Artinya, mereka harus menyampaikan pendapatnya sebagai artikulasi kepentingan dan agregasi

¹ Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 147

kepentingan masyarakat, yang diambil dari partai politik karena merupakan perwujudan politik masyarakat.²

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang independen,³ memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme jalannya pemilu. Begitu juga dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya dengan independen. Maka terkait penyelenggaraan Pilkada Lampung yang seharusnya dijadwalkan pada tahun 2013 dan selambat-lambatnya bualan Oktober 2013 terjadi kemoloran waktu dalam Pilkada Provinsi Lampung. Sebelumnya KPU Lampung menetapkan Keputusan Nomor: 75/Kpts/KPU-Prov-008/2012 tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara yakni pada hari Rabu, 2 Oktober 2013 untuk putaran pertama dan pada hari Rabu, 4 Desember 2013 untuk putaran kedua. Komisi Pemilihan Umum kemudian menjadwalkan kembali pada tanggal 2 Desember 2013, hal ini pun juga gagal dilaksanakan. Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/Kpts/KPU-Prov-008/2013 Komisi Pemilihan Umum Lampung telah menetapkan kembali hari Kamis, 27 Februari 2014 putaran pertama dan pada hari Sabtu, 10 Mei 2014 untuk putaran kedua, namun hal tersebut juga ditunda. Kemudian dalam rapat pleno KPU Provinsi Lampung Nomor: 09/BA/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 menetapkan, bahwa hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Lampung periode 2014-2019 yaitu pada hari Rabu

² Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan, Cetakan Pertama*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2013), hlm.138.

³ Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Great Publisher, 2009), hlm. 185

tanggal 9 April 2014 bersamaan dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dan KPU Lampung menyepakati pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada hasil pleno tersebut.⁴

Pemilu di Indonesia selama ini dilaksanakan secara terpisah yang diselenggarakan oleh KPU/KPUD, yaitu pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu kepala daerah gubernur, bupati/ wali kota.

Pada dasarnya ketika pemilu dilaksanakan secara terpisah antara eksekutif dan legislatif seperti yang masih dijalankan sampai sekarang ini, maka kinerja eksekutif dan legislatif tidak dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan seimbang. Sebagaimana dapat dipahami bahwa pada tahun 2009-2014 telah memperoleh anggota DPR, DPD dan DPRD, pada tahun 2014-2019 semua calon anggota DPR, DPD dan DPRD akan mengganti masa jabatan 2009-2014.

Keberlangsungan sistem pemilu seperti yang biasa dijalankan sampai saat ini berdampak kurang baik, khususnya di daerah otonom baik provinsi, kabupaten/kota. Bagi daerah provinsi, kabupaten/kota antara eksekutif (gubernur dan bupati/ wali kota) dan legislatif (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak bisa berjalan secara efektif dan seimbang, karena pemilu tidak berlangsung secara serentak. Proses pelaksanaan pilkada juga tidak terkontrol dengan baik karena menjadi urusan masing-masing daerah sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip pemilu. Hasil pilkada (kepala daerah terpilih) tidak

⁴ Kompas, *Bandar Lampung "Pilkada Digelar 9 April*, (Rabu, 19 Februari 2014), hlm. 23

kongruen atau tidak tersambung dengan baik dengan peta politik DPRD, sehingga hubungan kepala daerah dengan DPRD lebih bersifat transaksional. Inilah yang menjadi sumber utama korupsi di daerah. Hal ini akan mempengaruhi kinerja pada penataan birokrasi daerah yang akan disusun serta dijalankan dalam pemerintahan lima tahun kedepan.

Maka dalam membangun sistem demokrasi yang lebih baik, pemerintah harus berani mengambil terobosan baru dalam keberlangsungan pemilu kedepan yakni pemilu yang dapat berlangsung secara serentak. Pemilu serentak bagi penyusunan secara garis besar dapat dilaksanakan dengan beberapa metode. *Pertama*, penyelenggaraan pemilu serentak untuk eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota. *Kedua*, penyelenggaraan pemilu serentak untuk legislatif (DPRD) dan eksekutif (Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota). *Keiga*, penyelenggaraan pemilu serentak untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).

Perkumpulan pemilu dan demokrasi (Perludem) merekomendasikan agar pemilu serentak digelar dua kali dalam kurun lima tahun: pertama, pemilu nasional (memilih DPD, DPR, presiden dan wakil presiden) yang diselenggarakan pada tahun pertama; dan kedua, pemilu daerah (memilih DPRD dan kepala daerah) yang diselenggarakan pada tahun ketiga. Cara ini tidak hanya menghemat biaya, mengurangi beban penyelenggaraan, dan memudahkan pemilih bersikap

rasional, tetapi juga memperkuat partai politik dan menciptakan pemerintahan kongruen, serta menghindari pemerintahan terputus.⁵ Dengan demikian, maka kedepan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, mengingat pemilu yang berlangsung selama ini telah banyak menghabiskan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran.

Penyederhanaan pemilu sebagaimana yang terjadi di Provinsi Lampung yakni pilgup dan pileg dilaksanakan secara berbarengan dalam pemilihannya. Ini adalah sebuah model baru pemilu yang dapat menjadi contoh untuk pemilu-pemilu kedepan, sebagai representatif memperbaiki demokratisasi di Indonesia. Demokrasi juga dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang suara tunggal melalui proses pemilu.⁶

Sepanjang sejarah di Indonesia, maka akan memberikan warna baru dalam pelaksanaan pemilu 2014 ini. Provinsi Lampung adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang menjadi model pertama pemilu serentak 9 April 2014.

Pemilu kali ini menarik untuk di kaji dan dicermati dalam prosesi keberlangsungannya, khususnya di daerah Provinsi Lampung. Penulis sendiri akan mencoba menelusuri bagaimana persoalan pemilu Calon Anggota Legislatif dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dengan berbarengan di

⁵ http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1340:pemilu-serentak-versi-mk-dan-nasib-pilkada&Itemid=123) diakses pada tanggal 9 september 2014, pkl: 22.00 WIB.

⁶ Wahyudi Kumorotomo dan Agus Pramusinto, *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gava Media dan MAP.UGM, 2009), hlm. 47

Provinsi Lampung. Mengenai pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan ini tentu akan menjadi lebih berwawasan luas dan menambah pengetahuan baru dalam upaya mengembangkan sistem pemilu dimasa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan penyusun dalam latar belakang masalah di atas maka, penyusun merumuskan permasalahan Bagaimanakah Manajemen Pemilu KPUD Lampung Dalam Melaksanakan Pemilu Legeslatif Dan Eksekutif Secara Serentak Tahun 2014?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian:
Menemukan model pemilu Legeslatif dan Eksekutif secara serentak.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah keilmuan atau wawasan dalam mengembangkan model pemilu yang baik.
 - b. Diharapkan mampu menjadikan khasanah keilmuan yang bermanfaat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia kedepan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kotributor wawasan khazanah ke-Bangsaan dan ke-islaman serta dapat dijadikan rujukan penelitian lainnya dalam kajian yang sama.
- d. Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema skripsi yang sepadan.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, makalah-tulisan bebas, skripsi, tesis, dan disertasi yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Zainal Arifin dengan judul “Komisi Pemilihan Umum 1999 di Indonesia dalam Persepektif Hukum Islam”. Pembahasan skripsi ini mengidentifikasi secara historis untuk mengungkap kronologi yang ada didalam pemilu 1999, posisi KPU di Indonesia baik dalam kontek sosial

maupun politik dalam hukum islam. Skripsi ini fokus pada peran KPU ditinjau dari persepektif siyasah dalam pemilu di indonesia tahun 1999.⁷

2. Skripsi karya Edi Susanto “Komisi Pemilihan Umum Persepektif Hukum Islam”. Skripsi ini ditekankan pada fokus persoalan eksistensi dan peran KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dipandang dari sudut islam.⁸
3. Skripsi karya Mas’udin Nur “Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Persepektif Siyasah”. Dalam karya skripsi ini fokus pada peran KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum serta bagaimana pertanggungjawaban dalam persepektif siyasah.⁹
4. Skripsi karya Marcos “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pencalonan Pilkada Tulang Bawang Dalam Persepektif Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah: (Studi Di KPU Tulang Bawang)”. Dalam karya skripsi ini dilakukan di KPUD Tulang Bawang yang fokus pada persoalan mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan pilkada tulang bawang tahun 2012 menurut konsepsi hukum Islam dan fiqih siyasah.¹⁰
5. Skripsi karya Yusandi Merwanda Yuli “Eksistensi Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum: (Studi Pada Panitia Pemilihan Umum Provinsi Lampung”.

⁷ Zainal Arifin, “*KPU, Komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Persepektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004).

⁸ Edi Susanto, “*Komisi Pemilihan Umum Persepektif hukum Islam*”, Skripsi, (Yogyakarta: universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2005).

⁹ Mas’udin Nur, “*Pertanggung Jawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Persepektif Siyasah*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

¹⁰ Marcos, “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pencalonan Pilkada Tulang Bawang Dalam Persepektif Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah: (Studi Di KPU Tulang Bawang)*”, Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2014).

Dalam karya skripsi ini fokus pada Eksistensi Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang dilakukan di KPUD Lampung.¹¹

6. Buku, penulis DR. Suharizal, SH., M.H. “Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang” didalam buku ini menguraikan tentang regulasi, dinamika pelaksanaan pemilukada, baik perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun praktik pelaksanaannya, serta menawarkan gagasan perbaikan pemilukada yang dapat diterapkan dimasa mendatang.

Banyak hasil penelitian ilmiah yang dilakukan mengenai pemilu dan pilkada dalam sebuah karya skripsi atau buku, namun penulis belum menemukan dari berbagai hasil karya skripsi yang penulis telusuri terkait pemilukada dan pemilu legislatif yang berlangsung secara serentak. Dari beberapa karya skripsi yang penulis telusuri, inti pembahasannya hanyalah pada KPU dan proses berjalannya pemilu. Penelitian yang akan penulis lakukan dalam kesempatan ini adalah terkait persoalan manajemen KPU dalam melaksanakan pemilu legislatif dan pilgub secara serentak, serta bagaimana hal ini ditinjau dari persepektif siyasah.

Lebih khusus lagi penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan di provinsi Lampung, karena banyak penelitian yang dilakukan di provinsi Lampung terkait pemilu atau pemilukada, namun bukan persoalan pemilu atau pemilukada yang berlangsung secara serentak, sebagaimana pelaksanaan pemilu yang sudah berlangsung pada tanggal 9 April 2014.

¹¹ Yusandi Merwanda Yuli “*Eksistensi Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum: (Studi Pada Panitia Pemilihan Umum Provinsi Lampung)*”, *Sekripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013).

E. Kerangka Teoritik

1. *Good and Clean Governance*

Good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkahlaku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *good corporate*.

Dalam konteks Indonesia substansi wacana *good governance* dapat dipadankan dengan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Lebih jauh Bakti menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai level pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik serta ekonomi. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean governace*), adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab.¹²

Good governance adalah pengelolaan pemerintahan yang baik dalam sektor publik, badan usaha maupun kegiatan organisasi masyarakat yang dilakukan atas prinsip-prinsip akuntabel, transparansi, keterbukaan dasar

¹² Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*”, Cetakan Pertama (Jakarta:ICCF UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foundation 2000), hlm. 216.

hukum (kepastian hukum).¹³Dari tindakan atau tingkahlaku aparatur pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good governance* dalam tindakan keseharian.

Secara terminologi *good governance* sering dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau tata pemerintahan yang baik, menurut pendapat A.S Herby yang dikutip oleh Martin Jimung menyebutkan istilah *good governance* memfokuskan diri pada tindakan, dari pada tindakan fakta atau tingkahlaku *governing*, yakni mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negara.¹⁴

Sebagaimana Bekti, Santoso menjelaskan bahwa *good governance* sebagaimana didefinisikan UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik jika (*good sound*) jika dilakukan dengan efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan.

Tuntutan pengelolaan pemerintah yang profesional dan akuntabel, ketika wacana demokrasi berkembang kesadaern umum masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi yang bertumpu pada peran sentral warga negara dalam proses sosial dan politik bertemu dengan prinsip-prinsip dasar

¹³ Komaruddin, Memacu Reformasi Birokrasi untuk Menjasikan Good Governance, Clean governance dan Bebas KKN, (Jakarta: Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 2006), hlm.28.

¹⁴ Martin Jimung, *Politik lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Persepektif Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005), hlm.103.

good governance, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dirumuskan bersama oleh pemerintah dan komponen masyarakat madani.

Sejalan dengan prinsi-prinsip tersebut di atas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan. Pemerintahan juga biasa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tidak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktifitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktifitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.

Demi tercapainya kondisi sosial ekonomi tersebut di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, *clean and good governance* dapat terwujud secara maksimal jika di topang oleh dua unsur yang saling terkait: negara dan masyarakat madani yang didalamnya terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari persepektif *birokrasi elitis* menjadi *birokrasi populis*, yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, sebagai komponen diluar birokrasi negara, sektor swasta harus pula

terlibat dan dilibatkan oleh negara untuk berperan serta dalam proses pengelolaan sumber daya dan perumusan kebijakan publik.

Namun demikian, keterlibatan sektor swasta ini akan berdampak positif jika prinsip-prinsip fundamental *good and clean governance* pada saat bersamaan juga dijalankan oleh sektor swasta. Dengan ini, maka implementasi prinsip *good governance* akan berjalan maksimal jika ditopang oleh komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip baik oleh negara maupun komponen masyarakat madani, yang didalamnya terdapat sektor swasta. Jika dua komponen penting ini memahami dan menyadari arti penting prinsip *good governance* dalam upaya mengembangkan demokrasi dan kemaslahatan bersama, sikap apatisme masyarakat atas kinerja dan pelayanan publik birokrasi pemerintah maupun swasta dapat diperkecil secara maksimal.

2. Efektivitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdayaguna dan berhasil-guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan asas efisiensi biasanya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Prinsip efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat. Kedua, efektivitas dalam

konteks hasil, mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-besarnya kelompok dan lapisan sosial. Demikian juga makna efisiensi yang mencakup, efisiensi teknis, efisiensi ongkos, dan efisiensi kesejahteraan, yakni hasil yang diperoleh dari sebuah proses pekerjaan yang terserap penuh oleh masyarakat, dan tidak ada hasil pembangunan yang tidak bermanfaat.

Tujuan utama manajemen adalah pengelolaan secara sehat untuk mendapatkan efisiensi yang setinggi-tingginya dengan pengorbanan seminimal mungkin. Efisiensi merupakan usaha dalam penyusunan dan penggunaan organisasi, dalam penempatan dan penggunaan tenaga manusia, dalam pemakaian material dan uang, dalam penggunaan dan pemanfaatan waktu, dalam penggunaan dan pemanfaatan tempat, dalam pembuatan dan penggunaan metode dan prosedur untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan korban seminimal mungkin.

Efisiensi adalah semua upaya yang dapat dilakukan mulai dari pemilihan alternatif masukan (*input*) yang ada, dengan mengorbankan input yang tersedia dan terbatas, akan memperoleh keluaran (*output*) yang maksimal dengan tetap berpegang pada norma moral dan akhlak dan diridhoi oleh Tuhan. Prinsip “tetap berpegang pada norma moral dan akhlak dan diridhai Tuhan” merupakan suatu tolak ukur efisiensi menurut Islam.¹⁵ Prinsip-prinsip efisiensi yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengatur organisasi atau pemerintahan agar dapat efisien diantaranya

¹⁵ Muchtar Effendy, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bratara Karya, 1986), hlm. 150-151.

yaitu prinsip keseimbangan (*tawazun*), prinsip mencapai kemanfaatan, prinsip tidak mubazir, dan prinsip adil.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.¹⁷ Metode merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan dalam melakukan penelitian yang diharapkan sesuai pokok masalah sebagaimana penyusun uraikan diatas. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fielt receach*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari KPU Provinsi Lampung atau tempat dilakukannya penelitian, menggambarkan secara sistematis atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara akurat dan cermat terkait masalah yang diteliti.¹⁸

2. Sifat Penelitian

¹⁶ *Ibid*, hlm.153.

¹⁷ Anton Banker, *Metode-etode Filsafat*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1998), hl. 6.

¹⁸ M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga dapat mengungkap fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.¹⁹Penyusun menjelaskan data tentang Bagaimanakah Manajemen Pemilu KPUD Lampung Dalam Melaksanakan Pemilu Legeslatif Dan Eksekutif Secara Serentak Tahun 2014.

3. Obyek Penelitian

Pengumpulan/tempat pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di KPUD Provinsi Lampung.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris karena mencari data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah di KPUD Lampung.²⁰Dan juga dengan menggunakan pendekatan sosiologis sebagai pendukung. Pendekatan sosiologis merupakan salah satu pendekatan yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat atau fenomena sosial yang dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press,1993), hlm. 31.

²⁰ <http://haryantokusumo.Wordpress.com/>"perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-sosiologis"/, diakses pada tanggal 22 Agustus 2014. Pkl: 20.34 WIB,

hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk dapat memperoleh data secara langsung dan didukung dengan teori-teori serta cara yang digunakan yaitu:

- a. Dokumentasi,²² yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.
- b. *Interview* (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab.²³ interview juga ada yang menggunakan percakapan dengan metode bertatap muka yang bertujuan memperoleh informasi factual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain sebagainya.²⁴

6. Sumber Data

- a. Data Priemer

²¹ Abudian Nata, *metodologi studi islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 39.

²² Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

²³ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 17.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet. Ke-6, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

Data primer atau data pokok dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan,²⁵ yakni di KPUD Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, dan data-data pendukung lainnya.²⁶

7. Analisa Data

Data yang telah terkumpulkan akan dianalisa secara kualitatif dan menggunakan pola analisa deduktif. Pola ini merupakan langkah analisa data yang bersifat umum untuk ditarik dalam sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyusunan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis sendiri, dengan demikian akan tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Sementara untuk teknik penulisan ini penulis berpedoman pada buku

²⁵ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

“Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009.”

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penulisan skripsi ini nantinya terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pembahasan diawali dari Bab I merupakan pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II kerangka teoritis terhadap subyek penelitian. Bab III gambaran umum provinsi lampung, penggabungan pemilu gubernur dan pemilu legislatif di provinsi lampung 2014. Bab IV akan menganalisis hasil penelitian penulis sekaligus menjawab dari rumusan masalah mengenai Model Pemilu Legeslatif dan Eksekutif Secara Serentak: (Studi Kasus di Lampung 2014). Bab V merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasar dari UUD 1945, terbit UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang kemudian diganti UU Nomor 15 tentang hal yang sama. Sejak keluarnya Undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menjadi rezim pemilihan umum. Sebagai rezim, KPU yang bersifat hirarkis memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan umum nasional yakni pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilu kepala daerah. Kewenangan konstitusional, tugas dan kewajiban KPU ini tidak dapat dipengaruhi, diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan sistem atau prosedur yang bisa diperkirakan (*predictive system* atau *predictive procedur*), dengan demikian penyelenggaraan pemilu dapat diperkirakan kapan jadwal waktu, tahapan, dan beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum 2014 di provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki kewenangan konstitusional, tugas dan kewajiban serta bersifat hirarkis dan independen. Bersifat hirarkis berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum menaati aturan yang ditentukan oleh pusat yakni dalam hal ini KPU Republik Indonesia. Bersifat independen berarti dapat dijalankan secara mandiri tanpa ada pengaruh dari institusi manapun, dan

sekaligus independen yang dimaksud disini juga karean dalam pelaksanaan pemilukada dapat dilaksanakan sesuai keadaan atau kondisi setempat yakni dengan penuh kecermatan dan ketelitian.

Pemilihan umum legislatif 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 merupakan keputusan KPU Pusat. Begitu juga dengan pemilu gubernur dan wakil gubernur merupakan keputusan KPU Daerah. Komisi pemilihan umum Lampung dalam pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan pada tanggal 9 April 2014. Dengan demikian pemilihan umum tahun 2014 khusus di Provinsi Lampung berlangsung secara berbarengan yakni antara pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pemilihan umum kepala daerah yakni gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014-2019.

Dalam keberlangsungan pemungutan suara pemilihan umum di provinsi Lampung yang berbarengan disebabkan adanya kendala ketika di tengah proses tahapan sudah berjalan terdapat persoalan mengenai anggaran pemilukada yang belum dianggarkan dalam APBD tahun 2013. Sehingga dengan demikian pemerintah daerah melakukan penganggaran melalui APBD Perubahan, namun demikian pelaksanaan Pemilu gubernur dan wakil gubernur tetap berbarengan dengan pemilu legislatif, karena proses turunnya anggaran butuh waktu cukup lama.

Pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Lampung melakukan rancangan tahapan baru, beberapa tahapan baru yaitu mengenai pemutakhiran data pemilihan

yakni melakukan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS), penetapan dan pengumuman daftar pemilih tambahan (DP-Tambahan), penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT). Tahap pencalonan sampai pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmanai dan rohani, sekaligus penetapan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon. Masa kampanye selama 14 (empat belas) hari, dan pengadaan distribusi dan logistik perlengkapan pemungutan suara.

Penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung dalam hal distribusi dan logistik perlengkapan pemungutan surat suara, semua kebutuhan yang bersangkutan dengan pemilu legislatif dan eksekutif berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Tahap pelaksanaan pendistribusian dan logistik perlengkapan pemungutan surat suara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyelesaikan kelengkapan untuk pemilu legislatif dan melanjutkan pendistribusian kelengkapan logistik untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur Lampung.

Pelaksanaan penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan surat suara, serta penetapan hasil pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Lampung memprioritaskan hasil pemilu legislatif kemudian hasil pemilu Gubernur dan Wakil gubernur. Penghitungan surat suara mulai dari Desa/Kelurahan setiap tahap tersebut dengan urutan penghitungan dari kotak surat suara legislatif yakni dimulai dari DPR, kemudian DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya penghitungan kotak surat suara gubernur dan wakil gubernur. Tahapan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara pemilihan umum mulai dari

Desa/Kelurahan sampai tingkat Provinsi (PPS, PPK, KPU kabupaten, hingga KPU Provinsi) juga diurutkan mulai dari hasil rekapitulasi surat suara Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) kemudian hasil rekapitulasi Surat suara Gubernur dan wakil gubernur.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah yang bersamaan dengan pemilihan umum legislatif merupakan suatu bentuk demokrasi yang lebih baik, sebab pelaksanaan secara demikian memberikan banyak manfaat serta memberikan pelajaran baru bagi perpolitikan di negeri ini. Maka hal ini patut untuk ditiru setidaknya dapat diupayakan serta dilaksanakan pemilihan umum secara bersamaan atau serentak. Hal demikian juga mempermudah kinerja dan kerja baik KPU pusat maupun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dengan demikian maka pelaksanaan pemilu dalam jangka 5 (lima) tahun di Indonesia hanya akan melaksanakan pesta demokrasi 2 (dua) kali. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembagian waktu pelaksanaan pemilu untuk pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden dengan Legislatif (DPRD dan DPD) tahun pertama, dan untuk pelaksanaan pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota dan legislatif (DPRD I dan DPRDII) dapat diselenggarakan secara serentak pada tahun ke tiga.

B. SARAN

1. Pemilu merupakan wujud untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Demokrasi di wujudkan untuk mencapai

tujuan hidup bernegara yakni tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat. Maka proses pemilu yang harus diperbaiki merupakan langkah awal menuju kesejahteraan tersebut, dan pemilu dimasa mendatang lebih baik diselenggarakan secara bersama atau serentak guna mencapai tujuan rakyat pada umumnya dan tujuan negara pada khususnya mampu melaksanakan dengan singkat, tepat dan hemat.

2. Semua kebijakan yang berlaku di Indonesia berasal dari rakyat, oleh rakyat kemudian untuk rakyat adalah suatu hal yang semestinya dimiliki oleh rakyat. Namun demikian kehidupan yang diperoleh rakyat tidak memberikan keadilan yang semestinya. Maka kebijakan ini harus terus dipertahankan dan terus diperbaiki demi tercapainya tujuan bangsa kedepan.
3. Pemerintah dalam hal ini semua pemangku jabatan atau pelaksana jabatan yang berkaitan dengan kewenangan dalam pelaksanaan pemilu, harus menyadari bahwa pemilu dilaksanakan tidak lain adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Sehingga pemerintah perlu membenahi atau memperbaiki sistem pelaksanaan pemilihan umum yang selama ini berlangsung kurang lebih 15 (lima Belas) tahun mulai masa reformasi hingga sekarang.
4. Mengenai aturan hukum maka lembaga yang berwenag dalam hal ini DPR harus mendukung pelaksanaan pemilu serentak, dengan demikian penyelenggaraan pemilu memiliki aturn hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Buku-buku:

Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Banker, Anton, *Metode-etode Filsafat*, Jakarta: Graha Indonesia, 1998.

Iqbal,M, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Nata, Abudin, *metodologi studi islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993.

Syafiie Inu Kencana , *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta:Bumi Aksara, 2013

Zuhroh, Siti,dkk.,*Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal*, Yogyakarta: Ombak, 2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *UUD NRI Tahun 1945: UUD RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011.

Dahl, A. Robert,*Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi secara singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001

Fahmi Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Warka Warka, *Wawasan Kebangsaan Dalam NKRI*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

- Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Labola Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Agus Pramusinto, *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, Yogyakarta: Gava Media dan MAP.UGM, 2009.
- Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Great Publisher, 2009.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999.
- Djazuli, Prof., H., A., *fiqih siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999.
- Abdul Khaliq, Farid, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Hock, Sidney "Democracy", dan *Encyclopedia Amerika*, Danbury dan Connecticut: Grolier Incorporated, 1984.
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: 2005.
- Budiardjo, Miriam, Prof., Dr., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Syarbaini, Syahrial dkk., *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: 2011.
- Nurdin, Ali *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2006

- Warson Munawir, Ahmad, *Al-munawir, kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet. Ke-6, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Amiruddin, dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muchtar Effendy, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bratara Karya, 1986.
- Quraish Shihab., Prof., Dr., M., *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007
- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *al-Mu'jam al-mufahras li AlFar Al-Qur'an al-Karim*, t.tp.: t.p., th.
- M. Zainuddin, "Islam dan Demokrasi"
- Mustaqim, Abdul, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam jurnal studi islam profetika, Vol.4, no. 2, Juli 2002
- Aziz Dahlan, Abdul, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, dalam artikel *Siyasah asy-Syar'iyah*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeven, 1995.

Hidayat Komaruddin, dkk. *“Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani”*, Cetakan Pertama, Jakarta: ICCF UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foundation 2000

Komaruddin, *Memacu Reformasi Birokrasi untuk Menjadikan Good Governance, Clean governance dan Bebas KKN*, Jakarta: Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 2006.

Martin Jimung, *Politik lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Persepektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005.

Lembaga Demografi FEUI, *Dasar-dasar Demografi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2008.

Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sugeng Bob, dkk., *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktek*, Cet. pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Raharjo Dawam, *Sistem Pemilu: demokratisasi dan pembangunan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996.

Muhammad Natsir, *Efektifitas dalam pembinaan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Ulama’ Indonesia, 1987.

Komaruddin, *Manajemen Berdasarkan Sasaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

As-Shiddieqy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Siyasah*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1969.

Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah; Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Quran*, cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Skripsi:

Arifin, Zainal, *KPU, Komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Persepektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Susanto, Edi, *Komisi Pemilihan Umum Persepektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Nur, Mas'udin, *Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lemaga Penyelenggara Pemilihan Umum Persepektif Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Marcos, *"Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pencalonan Pilkada Tulang Bawang Dalam Persepektif Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah: (Studi Di KPU Tulang Bawang)"*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2014.

Yuli Yusandi Merwanda *"Eksistensi Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum: (Studi Pada Panitia Pemilihan Umum Provinsi Lampung)"*, Sekripsi, Universitas Lampung, Lampung 2013.

Lain-lain:

Romi, *Koordinator tehnik logistik KPU Provinsi Lampung*, wawancara pada tanggal 22 September 2014.

Bandar Lampung, Kompas, *"Lampung Jadi Uji Coba, Jum'at 21 Februari 2014*.

Bandar Lampung, Kompas, *"Pilkada Digelar 9 April, Rabu, 19 Februari 2014*.

Internet:

<http://www.kpud-lampungprov.go.id/kpud/html/index.php>

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>.

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>.

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/18/lampung>.

http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1340:pemilu-serentak-versi-mk-dan-nasib-pilkada&Itemid=123

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/18/lampung>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>.

<https://www.google.co.id/search?q=peta+provinsi+lampung.html>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung#Geografi>.

<http://www.lampungprov.go.id/sejarah-lampung.html>.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h_W8IkFT7iMJ:simreg.bappenas.go.id/view/profil/clickD.php%3Fid%3D8+&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-beta.

<http://lampung.tribunnews.com/2013/07/24/otonomi-daerah-lampung-pemekaran-masih-perlukah>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Lampung.

http://www.academia.edu/5587237/Perkembangan_Pemilu_dan_Demokrasi_di_Indonesia.

<http://www.voaindonesia.com/content/mk-pemilu-serentak-mulai-2019/1836473.html>.

<http://hukum.kompasiana.com/2014/01/23/keputusan-mk-tentang-pemilu-serentak-mulai-tahun-2019-626846.html>.

<http://haryantokusumo.Wordpress.com/”perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-sosiologis”/>,



**LAMPIRAN I
TERJEMAH**

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB II
26	29	Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum, yaitu di waktu pagi di hari yang dirayakan.
27	30	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
27	31	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.
28	32	Bukan demikian sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.
30	33	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

31	34	Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
33	35	Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
34	37	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
40	43	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
41	44	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
42	45	"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.
42	46	Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
44	47	1.Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati.

173	118	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
177	121	dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

**LAMPIRAN III
CURICULUM VITAE**

Nama : SAIFUL ANSORI

TTL : Lampung 25 Agustus 1988

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Orang Tua :

Ayah : Tarwi

Ibu : Parmi

Pekerjaan Orang Tua : Ayah : Tani
: Ibu : Tani

Alamat Orang Tua : Dusun II Rt/RW 005/004 Desa Kusumadadi,
Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah, Prov.
Lampung.

Pendidikan :

- TK Kusumadadi (1994-1995)
- SD N 1 Kusumadadi, Bekri, Lampung Tengah (1995-2001)
- MTs. Guppi Kusumadadi Lampung Tengah (2001-2004)
- MAN 2 Metro, Lampung (2004-2007)
- S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)

Pengalaman Organisasi:

- OSIS MAN 2 Metro Lampung (2005-2006)

- **Pramuka MAN 2 Metro Lampung (2005-2006)**
- **Paskibra MAN 2 Metro Lampung (2005-2006)**
- **PMR MAN 2 Metro Lampung (2005-2006)**
- **Pengurus BEM Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2010-2012**
- **Al-Hikmah Kampus 2010-2011**
- **Pengurus PMII Rayon Asram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2012-2013**
- **Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (BEM-FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2013-2014**

PUBLIKASI KARYA ILMIAH:

Tahun	Jenis	Judul
2012	Penelitian Hukum Pidana Islam	Percobaan Perzinaan: Kontribusi Hukum Islam Terhadap Rekonstruksi Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Kost-Kostan Sapen Sleman Yogyakarta)

KEGIATAN INTERNASIONAL:

Tahun	Jenis	Tema
2012	International Seminar	The Relevance Of Syaria With Contemporary Humanitarian Law: Avoiding Apologetic Intellectual Orientations
2012	International Seminar	Culture And Politics In The Anti-Syaria Movement In Western Europe And North America

2012	International Seminar	The qur'an, veil and muslim diaspora: negotiating sharia and citizenship in a changing global world order
2013	International Seminar	Shaping Islamic Tomorrow Today: Maqasid Persepective Towards A New Paradigma Of Islamic Research
2014	International Seminar	The referen to the sharia in arab politics and constitutions

KEGIATAN NASIONAL :

Tahun	Jenis	Tema
2011	Seminar Nasional	Kontribusi Pesantren Salaf Terhadap Dianamika Perkembangan Zaman
2011	Seminar Nasional	Kontekstualisasi Idealisme Mahasiswa Dalam Menjawab Problematika Bangsa
2012	Seminar Nasional	Menyoal Kualitas Out-Put Fakultas Syari'ah Dan Hukum Dalam Kancah Nasional
2012	Kongres FORMASI (Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia)	Eksistensi Syari'ah dalam Kompetensi Global
2012	Seminar Nasional	Menata Keragaman Keragaman Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan Di Indonesia
2012	Seminar Nasional	Siasat Kaum Muda Dalam Membendung Terorisme Dan Radikalisme Agama
2012	Seminar Nasional	Buruh Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2012	Seminar Nasional	Kitab Fiqih Nisantara: Menggali Tradisi Membangun Harmoni
2012	Seminar Nasional	Konflik Israel-Palestina Pasca Pemilihan Umum Amerika Serikat Tahun 2012
2012	Seminar Nasional	Is Islamic Stite Possible

2013	Seminar Nasional	Peran Pesantren Dalam Mewujudkan Karakter Bangsa
2013	Seminar Nasional	Islam Agama-Agama Dan Nilai Kemanusiaan
2013	Seminar Nasional	Memaknai Pemilu, Menyambut 2014
2014	Seminar Nasional	Menuju Pasar Bebas Asean: Kesiapan Indonesia Hadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 Dan Hukum Sebagai Penunjangnya
2014	Seminar Nasional	Peranan Pendidikan Notaris Dalam Membangun Kualitas Notaris Di Era Persaingan Global
2014	Seminar Nasional	Refleksi Mayday: Tantangan Buruh Pasca Penetapan 01 Mei Sebagai Hari Libur Nasional

KEGITAN TRAINING DAN PELATIHAN:

Tahun	Jenis	Tema
2011	Pelatihan Legal Drafting	Revitalisasi Undang-Undang: Manifesto Konsep Negara Hukum Di Indonesia
2012	Pelatihan Leadership	Menciptakan Kader Berjiwa Leader Di Tengah Degradasi Kepemimpinan
2012	Training Metodologi Penelitian	Membudayakan Research Mahasiswa: Upaya Implementasi Disiplin Keilmuan Syari'ah Dan Hukum Dala Realita Sosial
2013	Pelatihan kenotariatan	Pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Dan Pengisian SPT Pajak
2013	Sekolah Hukum Nasional	Mendidik Calon Praktisi Hukum yang Cerdas, Loyal, dan Berkompeten
2014	Pelatihan Bela Negara	Bela Negara Badan Eksekutis Mahasiswa Se-Jateng Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

KEGIATAN PENUNJANG KEILMUAN:

Tahun	Jenis Kegiatan	Tema
2010	Stadium General Jurusan Jinayah Siyasah	Finalisasi Konsep Negara Dalam Islam
2011	Ramadhan Bil-Jami'ah 1432 H	Ramadhan-Ku Damai: Memadukan Nilai Spiritual Dan Sosial Menuju Terciptanya Masyarakat Yang Rahmatan Lil-Alamin
2011	Seminar Entrepreneurship	Menanamkan Mental Entrepreneur, Upaya Mewujudkan Insan Mandiri
2011	Saresehan Pimpinan Pondok Se-DIY	Islam Warna-Warni: Refleksi Dan Pengalaman Masyarakat Pesantren Dan Konteks Ke-Indonesiaan Kontemporer
2011	Diskusi Buku The Grend Design	Karya Stephen Hauking Dan Leonard Mlodinow
2011	Saresehan Pemuda	Gerakan Pemuda Dalam Dinamika Politik Dan Supremasi Hukum Di Indonesia
2011	Stadium General Sekolah Politik	Berpolitik Dengan Berparagdimia Kemanusiaan
2012	Diskusi Terbuka Mengawal Indonesia	RUU Kamnas Melawan Demokrasi
2012	Komunitas Perempuan Syariah	Perempuan Riwayatmu Kini
2012	Lomba Debat Hukum	Kedudukan Anak Luar Nikah Paca Uji Materi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2012	Seminar Jurnalistik	Abadiakan Karyamu Dengan Menulis
2012	Diskusi Publik	Quo Vadis Undang-Undang Pendidikan

		Tinggi
2012	Bedah Buku” Khilafah Vis A Vis Nation Stete	Menggugat Sistem Nation Stete Dan Konsep Khilafah Di Indonesia Ditengah Degradasi Kebangsaan
2012	Orasi Kebudayaan	Menuju Kebangkitan Nasional: Mengembalikan Kesadaran Berpancasiala Upaya Menjawab Problematika Bangsa Menuju Indonesia Sejahtera
2012	Dialog Terbuka	Sunni-Syi’ah Di Indonesia
2012	Bedah Novel	Penakluk Badai: Novel Biografi KH. Kasyim Asy’arie
2012	Stadium General : Sekolah Anggaran Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)	Anggaran Pendidikan Dari Rakyat Untuk Rakyat
2013	Dialog Kebangsaan	Urgensi RUU Komponen Cadangan Dan Wajib Militer Dalam Upaya Mempertahankan Kedaulatan NKRI
2013	Dialog Kebangsaan	Bukan Indonesia 100% “Dialog Kebangsaan”: Dari Kampus Mencari Pemimpin Indonesia
2013	Peace Lecture Pekan Perdamaian Nasional	Mendamaikan Dan Mensejahterakan NKRI
2013	Diskusi Kebangsaan Pancasiala, Islam Dan Komunisme	Melacak Kontestasi Mazhab Ideologi Hukum Indonesia RUU KUHP
2013	Saresehan Akhir Tahun: Forum Pengawal Pancasiala 1 Juni 1945	Kedaulatan Pangan Dalam Persepektif Ekonomi Pancasila
2013	Bedah Buku	Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia

SITUS SOSIAL MEDIA:

Email : ansorisaeful@gmail.com

No HP : 0815 4000 4036

PIN BBM : 79e5fe52

